

***Collaborative Governance* dalam Siklus Pengelolaan Anggaran Desa Wisata Kacida Cibuntu di Padarincang**

**Irrelian Janewa¹, Laeli Nur Khanifah², Rina Amalia³, Rianti Lestari Putri⁴, Desvita
Selviandi Putri⁵, Nadia Suci Ramadhanita⁶**

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Corresponding Author's: irrelianxjnw18@gmail.com¹; khanifah92@untirta.ac.id²;
rinaamalia460@gmail.com³; ririirianti600@gmail.com⁴, desvitadsv@gmail.com⁵, nadiascr19@gmail.com⁶

e-ISSN: 2985-79

Article History:

Received: 15 September 2025

Accepted: 5 Oktober 2025

© 2024, The Author(s)

Abstrak: Collaborative governance dalam siklus pengelolaan anggaran Desa Wisata Kacida Cibuntu di Desa Padarincang, Kabupaten Serang, dengan menggunakan perspektif Ansell dan Gash (2008) pada aspek starting conditions, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat Pemerintah Desa Padarincang, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Macan Ketawa, serta masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran desa wisata telah dilakukan secara kolaboratif melalui pembagian peran antara pemerintah desa sebagai fasilitator anggaran dan kebijakan, serta Pokdarwis sebagai pengelola operasional wisata. Kolaborasi berjalan melalui forum musyawarah desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, namun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan anggaran masih terbatas. Penelitian juga menemukan bahwa pertanggungjawaban anggaran masih bersifat internal antara Pokdarwis dan pemerintah desa serta belum terintegrasi penuh ke dalam BUMDes, sementara bencana banjir berulang menjadi kendala utama yang menghambat tata kelola dan keberlanjutan pengelolaan anggaran wisata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance di Desa Padarincang masih berada pada tahap berkembang, sehingga diperlukan penguatan transparansi, integrasi sistem keuangan desa, serta mitigasi bencana agar pengelolaan anggaran desa wisata dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: collaborative governance, pengelolaan anggaran, desa wisata; partisipasi masyarakat, akuntabilitas



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pemanfaatan potensi lokal, budaya, dan sumber daya alam. Dukungan pemerintah terhadap sektor ini terlihat dari alokasi Dana Desa yang terus meningkat dan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana wisata, pemberdayaan masyarakat, serta promosi destinasi. Namun, peningkatan anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh tata kelola yang efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa wisata masih menghadapi persoalan transparansi, partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara optimal (Agustina & Gunawan, 2025; Susi et al., 2025; Affandi, 2025).

Selain persoalan transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan desa wisata juga menjadi tantangan yang sering ditemukan. Masyarakat umumnya lebih banyak dilibatkan pada tahap pelaksanaan, sementara proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh pemerintah desa atau kelompok tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan program wisata kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan belum mampu mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki desa (Setyaningrum et al., 2024). Padahal, partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif yang efektif dan berkelanjutan (Seputro & Mustafida, 2023).

Desa Padarincang, Kabupaten Serang, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata alam yang cukup besar dan terus dikembangkan sebagai penggerak ekonomi lokal. Potensi tersebut didukung oleh berbagai destinasi wisata berbasis alam seperti sungai, air terjun, dan aktivitas wisata petualangan yang dikelola bersama masyarakat. Pemerintah Desa Padarincang juga mengalokasikan anggaran desa untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi desa (Antaraneews, 2024; Portal Desa Padarincang, 2025).

Dalam pengembangan wisata tersebut, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Macan Ketawa memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah desa dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Namun, berbagai tantangan masih ditemukan, seperti kebutuhan penguatan koordinasi, pengelolaan administrasi, serta optimalisasi peran para aktor yang terlibat dalam pengembangan wisata (Maisaroh & Jakaria, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan collaborative governance untuk melihat bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa dan Pokdarwis dapat mendukung pengembangan desa wisata secara efektif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Padarincang dengan menggunakan perspektif Ansell dan Gash (2008), khususnya pada aspek face-to-face dialogue, trust building, dan shared understanding. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik kolaborasi antara pemerintah desa dan Pokdarwis dalam mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis efektivitas collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Padarincang, Kabupaten Serang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses kolaborasi antara pemerintah desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Macan Ketawa dalam pengelolaan desa wisata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui enam prosedur utama, yaitu analisis

dokumen, rekaman arsip, wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan pendukung, observasi langsung, observasi partisipan, serta artefak fisik sebagaimana dikemukakan oleh Creswell. Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menemukan pola dan hubungan antar variabel penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan, dokumen, dan hasil observasi. Lokasi penelitian berada di Desa Padarincang, Kabupaten Serang, yang dipilih karena memiliki potensi wisata yang berkembang serta praktik kolaborasi antara pemerintah desa dan Pokdarwis dalam pengelolaan anggaran dan pengembangan wisata desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Anggaran Desa Wisata di Desa Padarincang

1. Perencanaan Anggaran Desa Wisata

Perencanaan anggaran Desa Wisata Padarincang dilaksanakan melalui mekanisme yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah desa secara partisipatif. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan diawali melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Kampung yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, aspirasi, serta usulan terkait pengembangan potensi wisata yang dimiliki desa. Seluruh usulan tersebut kemudian dibahas kembali dalam Musyawarah Desa (Musdes) bersama pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk menentukan program-program yang dianggap paling prioritas. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa, melainkan melalui proses deliberatif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan wisata menjadi penting karena masyarakat merupakan aktor utama yang akan merasakan dampak langsung dari keberhasilan maupun kegagalan pengembangan wisata. Dengan demikian, perencanaan yang disusun cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta kondisi lapangan yang ada sehingga mampu meningkatkan efektivitas pembangunan desa wisata secara berkelanjutan (Rahmawati et al., 2024; Umam, 2023).

Selain menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur wisata, perencanaan anggaran Desa Wisata Padarincang juga diarahkan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa menyusun prioritas pembangunan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa serta kebutuhan destinasi wisata. Pembangunan akses jembatan, aula wisata, dan kolam renang menjadi contoh program yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dalam mendukung aktivitas wisata. Di sisi lain, pemerintah desa juga merencanakan berbagai kegiatan pelatihan seperti pemasaran produk, pengemasan produk, pengelolaan keuangan usaha, dan penggunaan sistem pembayaran digital guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi dari sektor pariwisata. Perencanaan tersebut diperkuat melalui dukungan pembiayaan dari berbagai pihak eksternal seperti program CSR, Bank BJB, dan PLN yang membantu memperluas sumber pendanaan pembangunan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Desa Wisata Padarincang telah mengarah pada prinsip pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan berbagai sumber daya secara efektif guna mendukung keberlanjutan pengembangan desa wisata (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Rahmawati et al., 2024).

2. Pelaksanaan Anggaran Desa Wisata

Pelaksanaan anggaran Desa Wisata Padarincang merupakan tahap realisasi dari berbagai program yang telah disepakati dalam proses perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan anggaran diwujudkan melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan wisata. Salah satu bentuk pelaksanaan yang paling nyata

adalah pembangunan akses jembatan menuju lokasi wisata yang dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan kemudahan aksesibilitas wisatawan dan masyarakat. Setelah pembangunan jembatan, pemerintah desa melanjutkan pembangunan aula wisata sebagai fasilitas pendukung berbagai kegiatan masyarakat dan wisata, serta pembangunan kolam renang yang menjadi salah satu daya tarik utama destinasi wisata desa. Pelaksanaan pembangunan tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang telah direncanakan sebelumnya dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas destinasi wisata, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menarik kunjungan wisatawan sehingga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar (Kantale et al., 2025).

Selain pembangunan fisik, pelaksanaan anggaran juga diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan wisata. Berbagai pelatihan mengenai pemasaran produk, pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, dan penggunaan sistem pembayaran non-tunai diberikan kepada masyarakat dan pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari aktivitas wisata. Pelaksanaan program ini didukung tidak hanya oleh dana desa, tetapi juga bantuan dari berbagai pihak eksternal seperti CSR, PLN, dan Bank BJB yang turut membantu pembangunan fasilitas wisata maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama akibat bencana banjir yang beberapa kali merusak fasilitas wisata dan memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian penggunaan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran memerlukan kemampuan adaptasi yang baik agar program pembangunan tetap dapat berjalan meskipun menghadapi hambatan di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, dan pihak eksternal menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Desa Wisata Padarincang (Umam, 2023; Rahmawati et al., 2024).

3. Pertanggungjawaban Anggaran Desa Wisata

Pertanggungjawaban anggaran Desa Wisata Padarincang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk pengembangan kawasan wisata. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pertanggungjawaban saat ini masih dilakukan melalui pelaporan internal antara Pokdarwis sebagai pengelola wisata dan pemerintah desa sebagai pihak yang melakukan pengawasan. Setiap penggunaan dana yang berasal dari aktivitas wisata maupun dukungan program pembangunan dicatat dalam pembukuan sederhana yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar. Sistem pencatatan tersebut diperoleh melalui pelatihan pengelolaan keuangan yang diberikan kepada pengelola wisata sehingga mampu menjadi dasar dalam penyusunan laporan penggunaan dana. Meskipun belum menggunakan sistem administrasi keuangan yang kompleks, praktik pencatatan dan pelaporan yang dilakukan menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa wisata. Pemerintah desa juga tetap melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa seluruh anggaran dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan operasional, pemeliharaan fasilitas, dan pengembangan destinasi wisata (Humaeroh et al., 2022; Kantale et al., 2025).

Di samping sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, penggunaan dana wisata juga diarahkan untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis, sebagian dana yang diperoleh dari aktivitas wisata tidak hanya digunakan untuk kebutuhan internal pengelolaan wisata, tetapi juga dialokasikan untuk membantu masyarakat dalam kondisi tertentu, termasuk ketika terjadi bencana banjir yang berdampak pada warga sekitar kawasan wisata. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan wisata memiliki dimensi tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, sistem pertanggungjawaban yang diterapkan masih memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait keterbatasan administrasi keuangan dan belum optimalnya transparansi kepada masyarakat luas karena laporan keuangan belum dipublikasikan secara terbuka. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan dan pendampingan agar sistem pelaporan keuangan dapat disusun lebih rinci,

transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dengan penguatan kelembagaan tersebut, akuntabilitas pengelolaan Desa Wisata Padarincang diharapkan dapat semakin meningkat dan mendukung keberlanjutan pembangunan wisata berbasis masyarakat (Umam, 2023; Humaeroh et al., 2022; Rahmawati et al., 2024).

Pengembangan Desa Wisata Padarincang

1. Potensi dan Kondisi Desa Wisata Padarincang

Desa Wisata Padarincang memiliki potensi wisata yang sangat beragam dan menjadi modal utama dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Potensi tersebut meliputi potensi alam, budaya, ekonomi kreatif, dan sumber daya manusia yang saling mendukung dalam menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan. Dari aspek alam, Desa Padarincang memiliki berbagai objek wisata yang memanfaatkan kekayaan lingkungan seperti Sungai Cikalumpang yang digunakan untuk aktivitas river tubing (papalidan), body rafting, susur sungai, camping ground, hingga jalur jungle trekking menuju Curug Cigumawang. Selain itu, kawasan Wisata Kacida Cibuntu juga menjadi daya tarik tersendiri karena mengusung konsep wisata edukasi dan konservasi melalui pengenalan berbagai tanaman obat, rempah-rempah, serta pelestarian tanaman langka. Keberadaan sumber daya alam yang masih terjaga memberikan nilai tambah bagi desa wisata karena mampu menawarkan pengalaman wisata yang tidak hanya bersifat rekreatif tetapi juga edukatif. Kondisi lingkungan yang masih asri menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan ekowisata yang saat ini semakin diminati oleh wisatawan yang mencari pengalaman wisata berbasis alam dan keberlanjutan lingkungan (Maisaroh, 2022; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2024; Kaduberuk et al., 2025).

Selain potensi alam, Desa Wisata Padarincang juga memiliki kekayaan budaya dan ekonomi kreatif yang menjadi identitas sekaligus daya tarik wisata. Berbagai tradisi dan kesenian lokal seperti Pencak Silat TTKKDH, Hadroh, Rudat, Rebana, Wawacan Syekh Abdul Qodir Jaelani, Tradisi Panjang Mulud, Tradisi Prahprahan, serta Bubur Suro Massal masih dilestarikan oleh masyarakat dan dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata budaya. Dari sisi ekonomi kreatif, masyarakat menghasilkan berbagai produk unggulan berupa kuliner tradisional seperti Jojorong, Pindang Ikan Parigi, Pais Solempat, Getuk Pisang Ijo, Bubur Jodo, dan berbagai olahan pisang yang menjadi ciri khas desa. Selain itu, terdapat pula kerajinan tangan berbahan bambu, tempurung kelapa, dan bahan daur ulang yang berpotensi menjadi produk souvenir wisata. Potensi tersebut didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, pelaku UMKM, hingga pengelola fasilitas wisata yang tergabung dalam Pokdarwis Macan Ketawa. Sinergi antara potensi alam, budaya, ekonomi kreatif, dan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kondisi Desa Wisata Padarincang telah memenuhi karakteristik pengembangan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism) yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan wisata (Aryadi, 2025; Kaduberuk et al., 2025).

2. Peran Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam Pengembangan Wisata

Pemerintah Desa Padarincang memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan desa wisata melalui penyediaan dukungan kelembagaan, regulasi, dan fasilitasi pembangunan. Salah satu bentuk nyata peran tersebut adalah pembentukan Pokdarwis Macan Ketawa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan aktivitas wisata desa. Pemerintah desa juga berfungsi sebagai perencana pembangunan dengan mengintegrasikan program pengembangan wisata ke dalam agenda pembangunan desa serta menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan program dan pendanaan. Melalui kerja sama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Serang, berbagai kegiatan pembinaan seperti pelatihan pemandu wisata, pengelolaan homestay, pengembangan ekonomi kreatif, dan sertifikasi kompetensi pelaku wisata dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya pembangunan yang dibutuhkan dalam pengembangan sektor pariwisata (Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2024; Serangkab.go.id, 2024; Bafadal & Damaradewi, 2025).

Sementara itu, Pokdarwis memiliki peran sentral sebagai penggerak utama masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang dimiliki desa. Dalam praktiknya, Pokdarwis tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan destinasi wisata, tetapi juga berfungsi sebagai perencana, pelaksana, mediator, edukator, dan akselerator pembangunan wisata berbasis masyarakat. Pokdarwis mengorganisasi berbagai kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, LPM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan wisata sehingga tercipta partisipasi yang luas dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, pengembangan wisata juga dilakukan melalui pendekatan pentahelix dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media guna memperkuat promosi serta keberlanjutan destinasi wisata. Melalui peran tersebut, Pokdarwis mampu mendorong tumbuhnya berbagai usaha ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga potensi wisata desa. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa dan Pokdarwis menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan Desa Wisata Padarincang sebagai destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan (Umam, 2023; Serangkab.go.id, 2024; Bafadal & Damaradewi, 2025).

3. Dampak Pengelolaan Anggaran terhadap Desa Wisata

Pengelolaan anggaran yang dilakukan dalam pengembangan Desa Wisata Padarincang memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas destinasi wisata maupun kesejahteraan masyarakat. Melalui alokasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur wisata, penyediaan fasilitas pendukung, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, desa wisata mampu berkembang menjadi salah satu destinasi yang memiliki daya tarik ekonomi dan sosial. Dampak tersebut tidak hanya terlihat dari peningkatan fasilitas wisata yang semakin memadai, tetapi juga dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang terlibat dalam sektor pariwisata. Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan anggaran adalah ditetapkannya Desa Padarincang sebagai Desa Keuangan Inklusif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten pada tahun 2023. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa wisata telah mampu mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang sebelumnya masih terbatas. Melalui program inklusi keuangan, masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk memanfaatkan layanan perbankan, pembiayaan usaha, tabungan, serta berbagai program peningkatan literasi keuangan yang mendukung pengembangan usaha produktif masyarakat (KIP DISKOMINFO, 2023).

Dampak lain dari pengelolaan anggaran adalah meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat melalui berkembangnya berbagai usaha yang terkait dengan aktivitas wisata. Kehadiran wisatawan mendorong pertumbuhan usaha kuliner tradisional, homestay, jasa pemandu wisata, perdagangan produk lokal, dan berbagai usaha kreatif yang dikelola masyarakat. Akses terhadap layanan keuangan formal juga membantu pelaku UMKM memperoleh modal usaha dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan secara lebih profesional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya menghasilkan manfaat dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, pengelolaan anggaran yang baik juga memperkuat kemandirian ekonomi desa karena masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran Desa Wisata Padarincang telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terbentuknya ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan (Rahmawati et al., 2024; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2024; KIP DISKOMINFO, 2023).

Temuan Lapangan dalam Tata Kelola Desa Wisata

1. Transparansi pengelolaan anggaran

Transparansi pengelolaan anggaran pada Desa Wisata Kacida Cibuntu menjadi bagian penting dalam tata kelola wisata desa karena pembangunan kawasan wisata memanfaatkan Dana Desa dan APBDes dalam jumlah yang cukup besar. Keterbukaan informasi anggaran terlihat melalui publikasi pembangunan fasilitas wisata dan rehabilitasi kawasan wisata pasca banjir. Informasi tersebut dapat diakses melalui media pemberitaan daerah serta penjelasan langsung dari pemerintah desa (Diskominfo, 2023). Transparansi anggaran tidak hanya berkaitan dengan penyampaian jumlah dana, tetapi juga mencakup arah penggunaan anggaran dan proses pengelolaan wisata desa (Kantale et al., 2025). Peneliti menemukan adanya keterbukaan informasi terkait pembangunan fasilitas wisata, sumber anggaran, hingga penggunaan dana rehabilitasi kawasan wisata yang terdampak banjir, yang diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Alokasi Anggaran Pengembangan Desa Wisata Kacida Cibuntu

No.	Jenis Anggaran	Keterangan
1.	Alokasi Dana Desa untuk Pengembangan Wisata	Pemerintah Desa Padarincang mengalokasikan 20% Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata Kacida Cibuntu
2.	Anggaran Pembangunan Jembatan Wisata	Pembangunan jembatan wisata sebesar Rp94.000.000
3.	Anggaran Pembangunan Aula Wisata	Pembangunan aula wisata sebesar Rp190.000.000
4.	Anggaran Pembangunan Kolam Renang	Pembangunan kolam renang sebesar Rp190.000.000

Sumber: (Banten Inside, 2024)

Berdasarkan tabel tersebut, pemerintah desa secara terbuka menyampaikan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fasilitas wisata secara bertahap. Pengembangan wisata dilakukan melalui pembangunan akses jembatan, aula wisata, dan kolam renang sebagai fasilitas pendukung wisata Desa Kacida Cibuntu. Transparansi penggunaan anggaran terlihat dari adanya publikasi rincian pembangunan wisata kepada masyarakat melalui media pemberitaan daerah (Banten Inside, 2024). Penjelasan terkait penggunaan anggaran wisata juga diperkuat melalui hasil wawancara bersama Bendahara Desa Padarincang, Bapak Ali. Beliau menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas wisata dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran desa dan kebutuhan pengembangan wisata. Bapak Ali menyampaikan:

“Tahun 2022 kami menganggarkan pembangunan akses jembatan. Tahun berikutnya anggaran dialokasikan untuk pembangunan aula. Setelah itu, anggaran difokuskan pada pembangunan kolam renang (Pak Ali, 12 Mei 2026).”

Beliau juga menjelaskan bahwa pengembangan Desa Wisata Kacida Cibuntu belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena kawasan wisata tersebut belum resmi diluncurkan akibat terdampak bencana banjir. Pengelolaan wisata sebelum proses launching masih berada di bawah pengelolaan BUMDes. Bapak Ali menyampaikan, “Wisata Kacida belum di-launching sehingga belum ada tata kelola maksimal akibat dari bencana.” Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan wisata dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran desa dan kebutuhan pengembangan kawasan wisata. Penjelasan lain dari Bapak Ali juga menerangkan bahwa pembangunan wisata tidak hanya bersumber dari Dana Desa, tetapi turut melibatkan kerja sama dengan CSR, Bank BJB, PLN dan beberapa instansi lain. Skema kerja sama tersebut memperlihatkan adanya upaya pemerintah desa dalam memperluas dukungan pendanaan untuk pengembangan wisata desa. Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa transparansi pengelolaan anggaran dilakukan melalui penyampaian sumber dana, tahapan pembangunan, serta arah penggunaan anggaran wisata kepada masyarakat (Saidin & Rinanda, 2022). Berikut data penataan ulang desa wisata Kacida Cibuntu yang dianggarkan:

Tabel 2. Anggaran Penataan Ulang Desa Wisata Kacida Cibuntu Pasca Banjir

No.	Jenis Anggaran	Keterangan
-----	----------------	------------

1.	Anggaran Rehabilitasi Pasca Banjir	Penataan ulang kawasan wisata menggunakan APBDes yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp218.631.000
2.	Biaya Penyewaan Alat Berat	Penyewaan 2 unit alat berat selama 11 hari dengan biaya Rp2.800.000 per alat per hari
3.	Fokus Penataan Kawasan Wisata	Normalisasi embung dan pembangunan kolam baru pasca banjir

Sumber: (Lensa news, 2025)

Bencana banjir yang melanda kawasan wisata turut memengaruhi penggunaan anggaran desa wisata. Pemerintah Desa Padarincang melakukan rehabilitasi kawasan wisata menggunakan APBDes yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp218.631.000 (Lensa news, 2025). Anggaran tersebut dipergunakan untuk penataan ulang kawasan wisata, termasuk normalisasi embung dan pembangunan kolam baru yang rusak akibat banjir. Pemerintah desa juga menyewa dua unit alat berat selama sebelas hari dengan biaya Rp2.800.000 per alat per hari guna mempercepat proses rehabilitasi kawasan wisata (Lensa news, 2025). Keterbukaan rincian penggunaan anggaran rehabilitasi tersebut menjadi bagian dari transparansi pemerintah desa dalam menyampaikan penggunaan dana pasca bencana kepada masyarakat (Humaeroh et al., 2022). Penjelasan mengenai dampak banjir terhadap pengelolaan wisata kembali disampaikan melalui hasil wawancara bersama Bendahara Desa Padarincang, Bapak Ali. Beliau menyampaikan:

“Anggaran yang terdampak hampir 1 M lebih. Semuanya hancur akibat bencana. Sudah dua kali kena banjir, kesalahannya tidak ada penanganan awal (Pak Ali, 12 Mei 2026).”

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah desa secara terbuka menyampaikan kerusakan kawasan wisata serta besarnya kerugian yang dialami pasca banjir. Penyampaian informasi mengenai kerusakan dan penggunaan anggaran rehabilitasi menjadi bagian dari transparansi pengelolaan anggaran wisata kepada masyarakat dan pengelola wisata desa. Uraian tersebut juga memberikan gambaran bahwa tata kelola wisata di Desa Padarincang masih menghadapi hambatan akibat kerusakan fasilitas wisata dan belum optimalnya mitigasi bencana pada kawasan wisata.

2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata

Partisipasi masyarakat pada pengelolaan Desa Wisata Kacida Cibuntu menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung keberlangsungan wisata desa. Keterlibatan masyarakat terlihat melalui aktivitas ekonomi, dukungan sosial, hingga keterlibatan pada kegiatan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola wisata dan pemerintah desa. Peneliti menemukan bahwa masyarakat sekitar memperoleh ruang untuk berpartisipasi melalui kegiatan berdagang, pengamanan kawasan wisata, serta keterlibatan pada pelatihan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran wisata desa turut menciptakan hubungan timbal balik antara pengelola wisata dengan masyarakat sekitar (Ferdiansyah, 2025). Aktivitas tersebut mencerminkan bahwa pengembangan wisata desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem wisata desa (Husainah et al., 2026).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Sumiah selaku masyarakat sekitar kawasan wisata, masyarakat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan keberadaan wisata melalui aktivitas ekonomi seperti berdagang di area wisata. Ibu Sumiah menjelaskan “Yang penting masyarakat mau jualan apa boleh gitu ya.” Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memperoleh ruang untuk terlibat secara langsung melalui kegiatan usaha di kawasan wisata. Kehadiran wisata desa turut memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat sekitar, terutama saat jumlah pengunjung meningkat. Ibu Sumiah juga menjelaskan bahwa pendapatan warung miliknya mengalami peningkatan ketika kawasan wisata ramai pengunjung dan terdapat kegiatan wisata seperti camping. Beliau menyampaikan, “Waktu ada kegiatan mah ya misalnya camping apa, nyampe satu juta semalam.” Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa aktivitas wisata desa berkontribusi terhadap perputaran ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata.

Partisipasi masyarakat juga terlihat melalui keterlibatan warga pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan UMKM yang difasilitasi pemerintah desa (Handiman et al., 2025). Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat pernah mengikuti pelatihan UMKM dan

kegiatan pembinaan ekonomi masyarakat yang berlangsung selama beberapa bulan. Ibu Sumiah menjelaskan, “Ada pelatihan UMKM itu, apa semacam itu online. Oh caranya... kan 3 bulan itunya sekolahnya.” Pelatihan tersebut menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat agar masyarakat sekitar wisata mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Peneliti juga menemukan bahwa masyarakat memperoleh informasi terkait kegiatan wisata melalui grup media sosial, Facebook, dan website wisata desa. Akses informasi tersebut mempermudah masyarakat mengetahui perkembangan wisata dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada kawasan wisata.

Keterlibatan masyarakat pada pengelolaan wisata juga tampak melalui partisipasi warga pada aspek keamanan kawasan wisata. Berdasarkan hasil wawancara, pengamanan kawasan wisata melibatkan masyarakat dari setiap RT sekitar kawasan wisata. Kehadiran masyarakat pada aspek keamanan menjadi bentuk kontribusi sosial masyarakat terhadap keberlangsungan wisata desa (Misriyani & Yuliastina, 2025). Meski demikian, peneliti menemukan bahwa masyarakat belum terlibat secara langsung pada pengelolaan anggaran wisata dan proses pengambilan keputusan terkait penggunaan bantuan atau pendapatan wisata. Ibu Sumiah menyampaikan, “Enggak, masyarakat mah nggak ikut campur.” Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat lebih dominan pada aspek operasional dan aktivitas ekonomi wisata dibandingkan keterlibatan pada tata kelola keuangan wisata. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ruang partisipasi masyarakat pada Desa Wisata Kacida Cibuntu masih berpusat pada dukungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar wisata. Hasil temuan lapangan terkait partisipasi masyarakat pada pengelolaan wisata dapat digambarkan melalui skema berikut:

Gambar 1. Skema Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata Kacida Cibuntu



Sumber: (Diolah Penulis berdasarkan Hasil Temuan Lapangan, 2026)

Skema gambar tersebut menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat pada Desa Wisata Kacida Cibuntu hadir melalui aktivitas ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan sosial terhadap keberlangsungan wisata desa. Keterlibatan masyarakat paling dominan terlihat pada kegiatan usaha dan dukungan operasional wisata, seperti berdagang, mengikuti pelatihan UMKM, serta membantu pengamanan kawasan wisata. Ruang partisipasi masyarakat pada aspek pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan keuangan wisata masih terbatas sehingga keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya menyentuh proses tata kelola wisata secara menyeluruh.

3. Kendala pengelolaan desa wisata

Pengelolaan Desa Wisata Kacida Cibuntu masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi keberlangsungan pengembangan wisata desa. Kendala terbesar berasal dari bencana banjir yang beberapa kali melanda kawasan wisata sehingga menyebabkan kerusakan fasilitas wisata dan penurunan aktivitas pengunjung. Dampak banjir tidak hanya memengaruhi sarana wisata, tetapi juga berpengaruh terhadap tata kelola wisata yang belum berjalan secara

maksimal. Peneliti menemukan bahwa proses launching wisata sempat tertunda akibat kerusakan kawasan wisata pasca banjir. Hambatan tersebut turut memengaruhi pengelolaan wisata, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga proses pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Berbagai hambatan yang ditemukan pada pengelolaan Desa Wisata Kacida Cibuntu dapat diidentifikasi melalui temuan lapangan, hasil wawancara, serta data pendukung yang dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 3. Kendala Pengelolaan Desa Wisata Kacida Cibuntu

No.	Fokus Kendala	Keterangan
1.	Kerusakan kawasan wisata pasca banjir	Kawasan wisata mengalami kerusakan akibat banjir dan membutuhkan rehabilitasi
2.	Anggaran terdampak bencana	Kerugian akibat banjir diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar
3.	Wisata belum di-launching	Tata kelola wisata belum berjalan maksimal akibat dampak bencana
4.	Penurunan aktivitas wisata	Kawasan wisata menjadi sepi pengunjung pasca banjir
5.	Pengelolaan regulasi wisata belum optimal	Tata kelola BUMDes dan pengintegrasian pendapatan wisata masih dalam proses penataan
6.	Keterbatasan partisipasi masyarakat pada pengelolaan keuangan	Masyarakat belum terlibat langsung pada pengelolaan anggaran wisata
7.	Tantangan integrasi lahan wisata	Beberapa jalur wisata masih melewati tanah milik warga dan proses MOU belum selesai
8.	Sistem pelaporan keuangan belum terbuka penuh	Pelaporan keuangan masih bersifat internal antara Pokdarwis dan Pemerintah Desa
9.	Mitigasi bencana belum optimal	Penanganan awal banjir dan sistem pengamanan kawasan wisata masih terbatas

Sumber: (Diolah Penulis berdasarkan Hasil Temuan Lapangan, 2026)

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kendala pengelolaan Desa Wisata Kacida Cibuntu tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik kawasan wisata akibat banjir, tetapi juga mencakup tata kelola wisata, regulasi kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat pada pengelolaan wisata desa. Hambatan paling dominan berasal dari bencana banjir yang menyebabkan kerusakan fasilitas wisata, penurunan jumlah pengunjung, hingga tertundanya proses launching wisata desa. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bendahara Desa Padarincang, Bapak Ali, kawasan wisata telah dua kali terdampak banjir sehingga proses pengembangan wisata belum dapat berjalan secara maksimal. Beliau menyampaikan, "Anggaran yang terdampak hampir 1 M lebih. Semuanya hancur akibat bencana. Sudah dua kali kena banjir, kesalahannya tidak ada penanganan awal." Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa kerusakan kawasan wisata berdampak besar terhadap pengelolaan fasilitas wisata dan penggunaan anggaran rehabilitasi pasca bencana.

Kendala pengelolaan wisata turut dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan wisata. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Sumiah selaku masyarakat sekitar wisata, banjir menyebabkan kawasan wisata menjadi sepi pengunjung dan aktivitas ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Ibu Sumiah menyampaikan, "Nah sekarang ya napak banjir, aduh sepi, yang main nggak ada. Yang camping jarang." Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penurunan jumlah pengunjung berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat sekitar kawasan wisata. Ibu Sumiah juga menjelaskan bahwa kawasan wisata sempat ditutup sementara dan masih berada pada tahap perbaikan pasca banjir.

Hambatan lain juga berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dan regulasi wisata desa. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Pokdarwis, pengelolaan pendapatan wisata belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui BUMDes karena tata kelola regulasi masih berada pada tahap penataan. Ketua Pokdarwis menyampaikan, "Secara prinsip, orientasi jangka panjang kami adalah menjadikannya sebagai sumber PAHDes melalui BUMDes. Namun, saat ini tata kelola regulasi BUMDes itu sendiri masih sedang dalam proses penataan." Ketua Pokdarwis juga menjelaskan bahwa pendapatan wisata masih dipergunakan

untuk operasional destinasi, pemeliharaan fasilitas wisata, dan pemberdayaan masyarakat sekitar wisata. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola kelembagaan wisata masih memerlukan penguatan regulasi dan pengembangan manajemen pengelolaan wisata agar pengelolaan desa wisata dapat berjalan lebih optimal.

Kendala pengelolaan wisata juga berkaitan dengan integrasi lahan wisata yang masih melibatkan kepemilikan lahan masyarakat sekitar kawasan wisata. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Pokdarwis, beberapa jalur wisata masih melewati tanah milik warga sehingga proses kerja sama lahan belum sepenuhnya selesai. Ketua Pokdarwis menyampaikan, "Karena lintasannya melewati tanah milik 9 warga yang berbeda, proses negosiasi regulasinya masih berjalan dan belum mencapai MOU final." Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan Desa Wisata Kacida Cibuntu masih memerlukan proses koordinasi dan negosiasi antara pengelola wisata dan masyarakat pemilik lahan.

PEMBAHASAN

Collaborative Governance dalam Siklus Pengelolaan Anggaran Desa Wisata

a. Starting Conditions

Kondisi awal pengelolaan Desa Wisata Padarincang berangkat dari kesadaran pemerintah desa dan masyarakat terhadap potensi alam berupa sungai, air terjun, dan lahan desa yang memiliki nilai wisata, namun belum didukung sistem pengelolaan yang mapan. Pengembangan wisata kemudian dibangun melalui kesepakatan bersama yang diformalkan dalam perencanaan desa dan didukung oleh berbagai bantuan eksternal seperti CSR, pelatihan UMKM, serta pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan pada sumber daya luar sebagai pemicu lahirnya kolaborasi, yang dalam perspektif collaborative governance merupakan karakteristik awal kolaborasi ketika kapasitas internal belum sepenuhnya memadai. Dengan demikian, kolaborasi di Padarincang tumbuh dari kebutuhan untuk mengintegrasikan potensi lokal dengan dukungan aktor eksternal guna mewujudkan pengembangan desa wisata (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

b. Facilitative Leadership

Kepemimpinan dalam pengelolaan Desa Wisata Padarincang bersifat kolektif dengan melibatkan pemerintah desa, Pokdarwis, dan lembaga desa lainnya dalam proses pengambilan keputusan dan koordinasi program wisata. Pemerintah desa berperan menghubungkan hasil musyawarah ke dalam sistem penganggaran desa, sedangkan Pokdarwis menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan dan pengembangan wisata. Pola kepemimpinan ini mencerminkan konsep facilitative leadership yang menekankan peran pemimpin sebagai fasilitator dialog dan kolaborasi antarpihak, bukan sebagai pengambil keputusan tunggal. Namun demikian, adanya keterlibatan aktor yang memiliki posisi ganda dalam kelembagaan menunjukkan potensi tumpang tindih peran yang dapat memengaruhi fungsi pengawasan dan efektivitas kolaborasi apabila tidak diatur secara jelas (Ansell & Gash, 2008; Christensen, 2023).

c. Institutional Design

Secara kelembagaan, pengelolaan anggaran Desa Wisata Padarincang telah terintegrasi ke dalam mekanisme formal desa melalui Musdes, RKPDes, dan APBDes yang memungkinkan partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam proses perencanaan. Namun, pengelolaan pendapatan wisata masih dilakukan secara mandiri oleh Pokdarwis dan belum sepenuhnya masuk ke dalam sistem keuangan desa melalui BUMDes. Selain itu, transparansi informasi keuangan kepada masyarakat masih belum optimal sehingga menunjukkan bahwa desain kelembagaan masih berada pada tahap transisi antara tata kelola formal desa dan pengelolaan berbasis komunitas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur kelembagaan telah tersedia, tetapi implementasi prinsip integrasi dan transparansi masih memerlukan penguatan agar collaborative governance dapat berjalan lebih efektif (Setiyawan et al., 2025).

d. Collaborative Process

Proses kolaborasi dalam pengelolaan anggaran Desa Wisata Padarincang berlangsung melalui forum musyawarah desa, koordinasi antaraktor, serta kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama pengembangan wisata. Meskipun masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, keterlibatan mereka masih lebih dominan pada aspek pemanfaatan ekonomi dibandingkan pengambilan keputusan strategis. Kolaborasi antaraktor cenderung semakin kuat ketika menghadapi persoalan tertentu, seperti kerusakan fasilitas akibat banjir yang mendorong pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, dan pihak eksternal bekerja sama mencari solusi. Hal ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah berjalan dan membentuk kepercayaan antaraktor secara bertahap, meskipun masih bersifat berkembang dan belum sepenuhnya menjadi sistem kolaboratif yang stabil dan terlembaga secara kuat (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Efektivitas Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Padarincang

a. Efektivitas Kolaborasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis

Efektivitas kolaborasi antara Pemerintah Desa Padarincang dan Pokdarwis terlihat dari keberhasilan membangun kesamaan tujuan dalam mengembangkan potensi wisata desa melalui proses musyawarah yang melibatkan masyarakat dan berbagai lembaga desa. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pembagian peran yang relatif jelas, di mana pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator melalui dukungan kebijakan dan anggaran, sementara Pokdarwis bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional wisata. Selain pembangunan infrastruktur wisata yang didukung oleh dana desa dan program CSR, kolaborasi juga menghasilkan berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan UMKM, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa collaborative governance di Padarincang tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif warga dalam pengembangan wisata (Ansell & Gash, 2007; Emerson et al., 2012; Rahmawati et al., 2024).

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi

Faktor pendukung utama kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Padarincang adalah adanya komitmen bersama antara pemerintah desa, Pokdarwis, BPD, dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi alam sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan berbagai pihak eksternal seperti CSR, perguruan tinggi, PLN, dan BJB juga memperkuat kapasitas pembangunan melalui bantuan infrastruktur, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, kolaborasi masih menghadapi hambatan berupa bencana banjir yang menyebabkan kerusakan fasilitas wisata dan menghambat operasional destinasi. Selain itu, tata kelola keuangan dan sistem pengelolaan wisata masih memerlukan penyempurnaan agar lebih akuntabel dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan mitigasi bencana dan tata kelola kelembagaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi pada masa mendatang (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012; Dwiyanto, 2020).

c. Implikasi Collaborative Governance terhadap Pengembangan Desa Wisata

Penerapan collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Padarincang memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kehadiran wisata menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat melalui warung, jasa wisata, perdagangan produk lokal, dan kegiatan ekonomi lainnya yang meningkatkan pendapatan warga. Selain itu, berbagai program pelatihan yang diselenggarakan melalui kolaborasi antaraktor turut meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemasaran, pengelolaan usaha, dan pemanfaatan teknologi. Meskipun demikian, keberlanjutan pengembangan wisata masih menghadapi tantangan akibat risiko bencana dan perlunya

penguatan tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, kolaborasi yang telah terbentuk perlu terus diperkuat melalui peningkatan transparansi, mitigasi risiko, dan pengelolaan yang adaptif agar manfaat pembangunan wisata dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Desa Padarincang (Putra, 2021; Rahmawati et al., 2022; Pratama & Nugroho, 2021).

KESIMPULAN

Pengelolaan anggaran Desa Wisata Kacida Cibuntu di Desa Padarincang menunjukkan adanya praktik collaborative governance yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Pokdarwis Macan Ketawa, masyarakat, serta berbagai pihak eksternal seperti CSR, perbankan, dan perguruan tinggi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengembangan wisata. Kolaborasi tersebut tercermin melalui pembagian peran antara pemerintah desa sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan kebijakan, kelembagaan, dan anggaran, serta Pokdarwis sebagai pengelola operasional destinasi wisata. Berdasarkan perspektif Ansell dan Gash (2008), pelaksanaan collaborative governance telah mencakup aspek starting conditions, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process, meskipun masih berada pada tahap berkembang. Kondisi awal kolaborasi muncul dari pemanfaatan potensi alam desa yang didukung sumber daya eksternal, kepemimpinan dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan Pokdarwis, perencanaan telah terintegrasi ke dalam sistem formal desa melalui APBDes, serta proses kolaborasi berlangsung melalui musyawarah dan koordinasi antaraktor. Dalam siklus pengelolaan anggaran, perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui Musdus dan Musdes, pelaksanaan diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur wisata dan program pemberdayaan masyarakat, sedangkan pertanggungjawaban masih dilakukan secara internal dengan sistem pembukuan sederhana yang belum dipublikasikan secara terbuka. Kolaborasi yang terbangun memberikan dampak positif berupa peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta berkembangnya akses keuangan inklusif. Namun demikian, pengelolaan wisata masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain bencana banjir yang berulang, belum optimalnya integrasi pengelolaan ke dalam BUMDes, keterbatasan transparansi keuangan, serta belum tuntasnya kerja sama pemanfaatan lahan dengan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa collaborative governance di Desa Wisata Kacida Cibuntu telah berjalan dan memberikan manfaat bagi pengembangan wisata, namun masih memerlukan penguatan kelembagaan, transparansi, dan keberlanjutan tata kelola agar mampu berkembang secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, A., & Syarif, S. (2023). Tantangan dan peluang inovasi kebijakan di sektor pariwisata Kabupaten Bima: Perspektif good public policy governance. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 832–843.
- Andriyanto, A. (2023). Governance kolaboratif dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bachtiar, N., Tamrin, S. H., Pauzi, R., Prilasandi, A. D., & Rafliansyah, M. (2022). Collaborative process dalam pengelolaan desa wisata. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(3), 340–364.
- Bafadal, R., & Damaradewi, M. (2025). Peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 3, 284–296.
- Banten Inside. (2024). Desa wisata Padarincang Kabupaten Serang: Jadikan dana desa untuk pengembangan wisata. <https://banteninside.co.id/banten/desa-wisata-padarincang-kabupaten-serang-jadikan-dana-desa-untuk-pengembangan-wisata/>
- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Serang. (2023). OJK jadikan desa wisata Kacida Cibuntu Padarincang desa keuangan inklusi.

- <https://diskominfo.serangkab.go.id/baca/ojk-jadikan-desa-wisata-kacida-cibuntu-padarincang-desa-keuangan-inklusi>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fatin, A. D., Devina, F., & Musleh, M. (2024). Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di desa wisata Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Fazri, S. N., Sudiapermana, E., Kamarubiani, N., & Sulistiono, E. (2025). Penerapan CHSE melalui pendekatan community-based tourism desa wisata Pagerwangi. *Dikus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 9(1), 57–67.
- Ferdiansyah, L. F. (2025). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata di Desa Timbanuh Kecamatan Pringgasela. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 14(1), 453–460.
- Handiman, U. T., Yuliati, Adam, D., & Cahya, W. A. (2025). Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pemasaran digital. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 10(1), 1–10.
- Hertika, F. F., Mahardhani, A. J., & Sulton, S. (2025). Pendidikan politik berbasis desa wisata: Analisis partisipasi warga. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(2), 195–201.
- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis transparansi dalam mendukung akuntabilitas realisasi dana desa. *Jurnal Moderat*, 8(1), 79–91.
- Husainah, N., Bantulu, L., Prihanto, P. H., Kristanto, E., & Hakim, C. B. (2026). Pengembangan ekowisata berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 23816–23827. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6046>
- Kantale, V. A., Poputra, A. T., & Wokas, H. R. N. (2025). Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 558–569. <https://doi.org/10.58784/rapi.392>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). Desa wisata Padarincang. Jejaring Desa Wisata (Jadesta). <https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/padarincang>
- Lensa News. (2024). Pemdes Padarincang tata kembali wisata Kacida Cibuntu yang diterjang banjir. <https://lensanews.id/pemdes-padarincang-tata-kembali-wisata-kacida-cibuntu-yang-diterjang-banjir/>
- Madinah, R., Syafitri, A., & Pratama, I. N. (2025). Membangun kepercayaan publik melalui transparansi anggaran. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, 2(1), 331–338.
- Misriyani, S., & Yuliasitna, R. (2025). Pengembangan desa wisata keris dalam perspektif modal sosial. *Prosiding Seminar Nasional FISIP*, 2(1), 223–248.
- Paludai, M. S., Hatu, R. A., Latare, S., & Bumulo, S. (2025). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Minanga. *Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 63–74.
- Putra, T. H., Puryadi, D. I., Rahman, K., & Abdurrahman. (2025). Analisis potensi wisata dan dampak ekonomi desa wisata. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 14(1), 447–452.
- Putri, E. P. (2025). Optimalisasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Journal of Economics, Business, Accounting and Management*, 3(1), 30–40. <https://doi.org/10.61476/1781gc34>
- Rahmawati, R., Satrio, A., & Yusuf, M. (2024). Penyuluhan identifikasi potensi 3A pada desa wisata di Kabupaten Serang. *WINDRADI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 14–21. <https://doi.org/10.61332/windradi.v2i1.184>

- Rakhman, L. F., Rochman, G. P., & Kurniasari, N. (2023). Model kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata berbasis agro-ekowisata dan budaya. Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning, 3(2), 606–616.
- Ramadan, R., Widiyanto, N., & Ihalauw, J. J. (2022). Peluang dan tantangan desa wisata berkelanjutan. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 1784–1810.
- Saidin, & Rinanda, W. W. (2022). Transparansi pengelolaan anggaran desa. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1), 178–190. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.57>
- Serangkab.go.id. (2024). Desa wisata Padarincang Kacida Cibuntu masuk 50 desa wisata terbaik ADWI 2024. <https://serangkab.go.id/berita/desa-wisata-padarincang-kacida-cibuntu-masuk-50-desa-wisata-terbaik-adwi-2024>
- Setiyawan, L. S., et al. (2024). Collaborative governance dalam pengelolaan desa wisata. Jurnal Administrasi Publik.
- Umam, C. (2023). Usulan pengembangan desa wisata Padarincang berbasis ergonomi. Jurnal Sains Terapan Pariwisata, 8(2), 91–100. <https://doi.org/10.56743/jstp.v8i2.272>